KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

YTP48MYB

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

K									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 N	A.1 NPWP : 68 807 587 8 722 000								
A.2 NIK :									
A.3 Nama : RETNO EKO SAYEKTI AS									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
	4 21-402-01			2.098.400	2.098.400	0	15	314.760	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022									
Nama Dokum			ımen	en Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	<u>-</u>		2 8	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5			UMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Denga				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang iik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	